

LAPORAN KINERJA



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA JAMBI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya Alhamdulillah Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memenuhi/melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan ini jauh dari kesempurnaan, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk perbaikan Laporan ini kedepan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Instansi dan selanjutnya atas sumbang saran yang diberikan kami haturkan terima kasih.

Jambi, Januari 2018

Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Jambi

Ir. H. A. DAMIRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19610416 199303 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3.1 Organisasi Perangkat Daerah	3
1.3.2 Susunan Kepegawaian	10
1.3.3 Fungsi Strategis SKPD.....	11
1.3.4 Tujuan dan Sasaran SKPD	14
1.3.5 Strategis SKPD	17
1.3.6 Kebijakan	18
1.4 Isu-isu Strategis.....	18
1.5 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	20
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	20
2.1.2 Kebijakan dan Program	21
2.2 Indikator Kinerja Sasaran	24
2.3 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	31
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2017	32
3.2.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Strategis	34
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan	39
3.2.4 Prestasi Tahun 2017	40
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2017.	31
3.2	Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017	32
3.3	Nilai Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016-2017	38
3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 2017	39
3.5	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 merupakan wujud dari pertanggungjawabkan atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKj Tahun 2017 ini juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas Pembangunan Daerah Kota Jambi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, Percepatan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan fungsi perikanan,

peningkatan fungsi peternakan dan kesehatan hewan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kota Jambi secara keseluruhan.

LKj Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan program dan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jambi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. LKj ini juga disusun sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Performance Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017 sebagai kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi Tahun 2016 adalah:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2009 hingga 2016 Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi masih berbentuk SKPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya pada Tahun 2017 SKPD tersebut berganti nama menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dalam pasal 1 Peraturan Walikota tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaria Daerah yang secara umum mempunyai tugas meliputi:

- a. Melakukan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dians Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi mempunyai tugas membantu waliota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi selengkapnya sebagai berikut:

A. Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. penataan prasarana pertanian;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ikan, ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan peredaran sarana pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, peternakan dan perikanan;

- m. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
- b. pemberian bimbingan teknis;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;

- e. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
 - j. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan dan pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan;
- b. pengamanan teknis di bidang perikanan;
- c. bimbingan teknis di bidang perikanan;
- d. pengembangan produksi perikanan;
- e. pembinaan dan pengembangan usaha;
- f. pembinaan pasca panen hasil perikanan;
- g. dan rehabilitasi sumberdaya perairan;
- h. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan;
- i. pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos kesehatan ikan terpadu; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian peternakan dan perikanan;
- b. penyusunan program pertanian peternakan dan perikanan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian peternakan dan perikanan;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian peternakan dan perikanan;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian peternakan dan perikanan;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian peternakan dan perikanan;

- h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian peternakan dan perikanan;
- i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian peternakan dan perikanan;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian peternakan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Terdiri :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - 2. Seksi Produksi;
 - 3. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian
- f. Bidang Perikanan, terdiri :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Sumber daya Perikanan;

2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 3. Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri :
1. Seksi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan.
- h. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri:
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 3. Seksi Penyuluhan.
- i. UPTD, terdiri:
1. UPTD Kecamatan;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
 3. UPTD Balai Benih Ikan;
 4. UPTD Balai Benih Hortikultura;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Penyuluh.

1.3.3 Fungsi Strategis SKPD

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran kedepan tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin dicapai. Adapun rumusan Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 - 2018 adalah “Tewujudnya Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah”.

Untuk memahami Visi yang telah dirumuskan diatas, maka masing-masing pokok visi dijelaskan sebagai berikut :

- § Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Yang Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, harus mampu meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan petani. Petani mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang berbasis potensi lokal serta semakin mandiri, berbasis akhlak yang mulia dan berbudaya. Kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan yang berorientasi agribisnis mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Yang Mampu Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian daerah mengandung pengertian pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan Kota Jambi, selalu berwawasan lingkungan yang lestari berbasis potensi lokal menuju kemandirian daerah.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas serta enerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis;
- 2) Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan);
- 4) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- 5) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta kelembagaan;
- 6) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Adapun penjelasan dari masing-masing Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta penerapan teknologi tepat guna dibidang pertanian peternakan dan perikanan yang berwawasan agribisnis.

Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan selalu berupaya melakukan kegiatan pelatihan, seminar, perlombaan, pameran, studi banding, pengembangan informasi dan lain sebagainya untuk menambah wawasan agar pelaku usaha dapat menggali ilmu dan teknologi untuk meningkatkan pruduksi dan produktifitas usaha di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dirasa perlu memanfaatkan penerapan teknologi peternakan secara tepat guna, meningkatkan kuantitas dan kualitas genetik ternak, produk olahan hasil ternak dan pencegahan serta penanggulangan penyakit ternak.

2. Mengembangkan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan yang berdaya saing.

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas, Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan sehingga mampu berdaya saing.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan).

Dengan adaya peningkatan koordinasi dan sinergritas diharapkan dapat mengupayakan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi/ keamanan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumberdaya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Terwujudnya keamanan Pangan, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan pelaksanaan penyuluhan mencakup bagaimana pelaksanaan penyebaran materi penyuluhan, penerapan metoda penyuluhan, peningkatan kapasitas petani, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani secara kuantitas dan kualitas, serta bagaimana keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani petani.

5. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan.

Dengan cara menumbuhkan kembangkan ketersediaan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan yang berkualitas. Meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan sehingga mampu berdaya saing.

6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Dengan adanya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

1.3.4 Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan jangka menengah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

- 1) Terpeliharanya agroekosistem yang selaras dengan kultur budaya, sosial wilayah pemanfaatan lahan secara optimal.
- 2) Tersedianya pangan yang bermutu, cukup dan terjangkau daya beli masyarakat secara berkeadilan.
- 3) Tersedianya Peningkatan pendapatan petani.
- 4) Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dibidang pertanian.
- 5) Tersedianya kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

- 1) Dukungan infrastruktur, saprodi dan teknologi;
- 2) Penguatan kelembagaan petani dan permodalan yang berwawasan agribisnis;
- 3) Berkembangnya pengolahan hasil pertanian berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan;
- 4) Mendorong pemasaran pelaku agribisnis yang saling menguntungkan;
- 5) Terkendali Early Warning System (sistem Peringatan Dini) pada gangguan OPT maupun anomali iklim.

b. Bidang Peternakan

Tujuan jangka menengah Bidang Peternakan adalah terwujudnya peningkatan kualitas produk, kesehatan hewan dan optimalisasi usaha dibidang peternakan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Peternakan adalah :

- 1) Meningkatnya kesehatan ternak dan hewan peliharaan;
- 2) Meningkatnya kelayakan konsumsi pangan asal hewan;
- 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas mutu genetik ternak melalui Inseminasi Buatan;

- 4) Meningkatnya jumlah usaha peternakan yang berwawasan ekonomi kerakyatan;
- 5) Meningkatnya usaha pengolahan produk ternak;
- 6) Meningkatnya pengawasan stabilitas harga pasar dari produk ternak.

c. Bidang Perikanan

Tujuan jangka menengah Bidang Perikanan adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan ikan serta kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan;

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Bidang Perikanan adalah :

- 1) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dalam rangka menunjang ketahanan pangan;
- 2) Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sungai dan danau;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan serta meningkatkan konsumsi ikan perkapita.

d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tujuan jangka menengah Bidang ketersediaan dan distribusi pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Adapun sasaran jangka menengah bidang ketersediaan dan distribusi pangan adalah :

- 1) Terpenuhinya kecukupan pemasukan pangan dan gizi;
- 2) Terpantaunya stabilitas harga dan pasokan pangan;
- 3) Berkurangnya daerah rawan pangan.

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tujuan jangka menengah Bidang konsumsi dan keamanan pangan adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Adapun sasaran jangka menengah bidang Bidang konsumsi dan keamanan pangan adalah :

- 1) Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan ;
- 2) Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah.

f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Tujuan jangka menengah bidang prasarana, sarana dan penyuluhan adalah meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, peternakan dan perikanan.

Adapun sasaran jangka menengah bidang Bidang konsumsi dan keamanan pangan adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelompok tani;
- 2) Meningkatnya kemampuan lembaga tani.

1.3.5 Strategi SKPD

1) Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- b. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi;
- c. Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lembaga Distribusi Pangan).

2) Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha/utama pertanian, peternakan dan perikanan

- a. Pemberdayaan pelaku usaha dan utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan;
- b. Peningkatan kemampuan lembaga petani;
- c. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan;

- d. Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis;
- e. Peningkatan penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan tepat guna dan berkelanjutan;
- f. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.

1.3.6. Kebijakan

- 1) Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat pertanian, peternakan dan perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha.
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan;
- 3) Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan teknologi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan, kelestarian lingkungan dan usaha yang berkelanjutan;
- 4) Pembangunan Usaha peternakan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi menjadi pelaku usaha tradisional, semi modern dan modern;
- 5) Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan mutu genetik bibit (tanaman hortikultura, ikan dan ternak) serta pengembangan manajemen usaha peternakan;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana bidang usaha pertanian, peternakan dan perikanan;
- 7) Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan;

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis atau permasalahan utama (strategic issued) berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 adalah:

1. Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim

2. Meningkatnya alih fungsi lahan menjadi pemukiman
3. Surplus 10 juta ton beras Nasional dan 1 juta ton beras propinsi
4. Belum optimalnya ketersediaan pangan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan

Prioritas Pembangunan dari isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan Pangan Asal Hewan
2. Peningkatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan produksi Beras Kota Jambi
4. Peningkatan produksi dan produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura.
5. Optimalisasi potensi perikanan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, fungsi strategis SKPD, permasalahan utama yang dihadapi dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Menyajikan Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis, Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan Tinjauan Umum Capaian Kinerja dan Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Guna meningkatkan dan mengefektifkan kinerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi dalam mewujudkan visi dan misinya dalam situasi lingkungan yang berubah dengan sangat cepat, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai acuan kerja sekaligus bahan evaluasi menyeluruh dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai sasaran dan lokusnya selama 2 tahun kedepan;
- c. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Walikota Jambi Tahun 2013-2018 kedalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 2 tahun (2017-2018).

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yaitu mewujudkan peningkatan kualitas, kuantitas dan distribusi Produk Pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan sub sistim Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Sub sistim Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan memperhatikan

potensi keragaman sumberdaya pangan dan budaya setempat, Sub sistim Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub sistem Perikanan, Sub sitem Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta meningkatkan peran penyuluh dalam pembangunan pertanian.

Secara khusus tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keseragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga terjangkau;
- Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Sasaran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi
- Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergisi, berimbang dan aman;
- Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan yang handal;
- Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability)

2.1.2 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

1. Mendorong peningkatan produksi dan penerapan teknologi tepat guna;
2. Mendorong profesionalisme SDM ASN, Pelaku Usaha dan Lembaga tani;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Memperkuat pemantapan ketahanan pangan masyarakat berbasis keanekaragaman pangan sumber daya lokal;
5. Mendorong pengembangan penganekaragaman pengolahan dan konsumsi pangan;

6. Mendorong pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan.

b. Program

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerahkabupaten/Kota, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menangani 2 (dua) urusan yaitu :

1. Urusan Wajib, menyangkut urusan ketahanan pangan
2. Urusan Pilihan, menyangkut urusan pertanian yaitu pertanian, peternakan dan perikanan

Dalam melaksanakan 2 (dua) urusan Pemerintahan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misinya, maka disusun Program, Kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan sekaligus pendanaan indikatifnya. Jumlah Program dan Kegiatan yang disusun untuk tahun 2017 sebanyak 8 Program dan 42 kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Kegiatan Jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran;

- 11) Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam.
 - 12) Kejiata Perjalanan Dinas
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan peralatan perkantoran;
 - 2) Kegiatan rutin/berkala gedung kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 6. Program Pengembangan Data/Informasi
 - 1) Kegiatan Pengembangan data/informasi.
 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani
 - 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani.
 - 2) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan pemerintah.
 - 3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
 - 4) Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
 - 5) Kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternatif.
 - 6) Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan.
 - 7) Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan.

- 8) Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
 - 9) Kegiatan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi.
8. Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- 1) Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - 2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan;
 - 3) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
 - 4) Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
 - 5) Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian;
 - 6) Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan;
 - 7) Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - 8) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana peternakan dan pengolahan informasi pasar atas hasil produk peternakan;
 - 9) Kegiatan Pengembangan dan pelayanan pemotongan hewan;
 - 10) Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul;
 - 11) Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan;
 - 12) Kegiatan pengelola dan pemasaran produksi perikanan;
 - 13) Kegiatan Pendamping pada kelompok tani pembudidayaan ikan.

2.2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 6 (Enam) indikator sasaran yang terbagi menjadi 22 (Dua Puluh Dua) indikator pada kegiatan dan 2 (dua) indikator yang menjadi Indikator Utama (IKU). Rincian indikator tersebut pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<p>1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha/pelaku utama pertanian, peternakan dan perikanan</p>	<p>1. Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura</p>	1) terwujudnya persentase nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura
		2) Tercukupinya jumlah bibit buah-buahan yang bersertifikasi
		3) Tersedianya jumlah pupuk dan pestisida di wilayah kota jambi
		4) Terwujudnya persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
	<p>2. Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Peternakan dan kesehatan hewan</p>	1) Meningkatnya persentase populasi, peningkatan mutu ternak melalui Inseminasi Buatan (IB)
		2) Terobati/terpeliharanya ternak/hewan dan teridentifikasi pangan asal hewan yang diperjualbelikan
		3) Peningkatan pelayanan pasar ternak dan jumlah pengolahan produk ternak
		4) Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
	<p>3. Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Perikanan</p>	1) Terlaksananya operasional BBI
		2) Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi keluarga dan masyarakat
		3) Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan serta sosialisasi gemarikan
		4) Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan perikanan
	<p>4. Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan</p>	1) Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
		2) Peningkatan persentase ketersediaan pangan : - Energi, - Protein
		3) Penguatan Jumlah Cadangan Pemerintah (CPP)
	<p>5. Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan</p>	1) Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi
		2) Persentase pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan
		3) Persentase peningkatan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan
	<p>6. Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna bidang prasarana, sarana dan penyuluhan</p>	1) Peningkatan jumlah kapasitas tenaga penyuluh pertanian
		2) Persentase peningkatan kemampuan Lembaga Petani
		3) Peningkatan persentase penyuluh dan pendampingan bagi pertanian
		4) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada tahun 2017 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Walikota Jambi untuk mewujudkan target kinerja yang telah disepakati, sebagaimana tampak dibawah ini:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. A. Damiri, ME
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Syarif Fasha, ME
Jabatan : Walikota Jambi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2017

Pihak Kedua
Walikota Jambi

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi

dto

dto

H. SYARIF FASHA, ME

Ir. H. A. DAMIRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19610416 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
TAHUN ANGGARAN : 2017

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan	4 %
	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Peternakan		4 %
	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Perikanan		4 %
	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan		60,6 %
	Persentase pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		85,3 %
2.	Persentase pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengoahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna bidang prasarana sarana dan penyuluhan	Persentase pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna	12,17 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	2.199.324.000	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.036.199.000	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.750.000	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	
5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000	
6.	Program Perencanaan SKPD	5.000.000	
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	11.400.000	
8.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani	2.031.190.000	
9.	Program peningkatan produksi, Mutu rodok dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	5.498.112.000	

Jambi, Januari 2017

Pihak Kedua
Walikota Jambi

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Jambi

dto

dto

H. SYARIF FASHA, ME

Ir. H. A. DAMIRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19610416 199303 1 003

Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi antara lain :

1. Lingkungan Strategis

- Mempercepat inovasi teknologi pertanian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah diberikan pemerintah kepada petani
- Perumusan Kebijakan dan kelembagaan
- Perubahan pola Budidaya.

2. Perhatian dan Dukungan

- Percepatan pembangunan SDM dan kewirausahaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta Program kegiatan;
- Revitalisasi produktivitas pertanian melalui peningkatan penerapan teknologi dan diversifikasi;
- Mendukung agribisnis dan sistem usahatani dan industri pertanian yang berkemampuan daya saing;
- Meningkatkan manajemen usaha tani

Kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan Kota Jambi antara lain :

1. Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat pertanian, peternakan, dan perikanan baik aparatur maupun pelaku usaha.

2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntungkan dan menguatkan.

3. Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan teknologi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan, kelestarian lingkungan dan usaha yang berkelanjutan.
4. Pembangunan Usaha peternakan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi menjadi pelaku usaha tradisional, semi modern dan modern.
5. Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan mutu genetik bibit (tanaman hortikultura, ikan dan ternak) serta pengembangan manajemen usaha peternakan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana bidang usaha pertanian, peternakan dan perikanan.
7. Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung Kebijakan tersebut antara lain :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Pemberdayaan Petani

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan komoditas pertanian dalam upaya mendukung ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, panganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan, mendorong petani mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya usaha tani, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelembagaan.

Peningkatan kesejahteraan petani akan berimplikasi pada kemampuan petani dalam permodalan usaha sehingga diharapkan

memudahkan petani dalam meningkatkan skala usaha maupun diversifikasi usaha

b. Program Peningkatan Produksi, Mutu Produk, dan Diversifikasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil pangan melalui, intensifikasi dan diversifikasi tanaman yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif serta pengembangan IPTEK dalam mendorong alih teknologi pertanian, mendukung pertanian modern melalui peningkatan alat dan mesin pertanian dan juga mendorong produk pertanian berdaya saing tinggi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas penetapan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Penetapan kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Tingkat capaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut ;

Tabel. 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.

Skala pengukuran ordinal	Kategori
85 s/d 100 %	Sangat Baik
70 – < 85 %	Baik
55 – < 70 %	Cukup
< 55 %	Kurang

3.2 Capaian Kinerja Organsiasi

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilaporkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat capaian kinerja SKPD (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi bidang pertanian dan ketahanan pangan				
1.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura	a. Terwujudnya persentase nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura	16 %	14 %	87,5 %
6)		Tercukupinya jumlah bibit buah-buahan yang bersertifikasi	4.500 btg	3.500 btg	77,77 %
7)		Tersedianya jumlah pupuk dan pestisida di wilayah kota jambi	273,15 ton	273,15 ton	100 %
8)		Terwujudnya persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	4,25 %	4 %	94,11 %
2.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan	a. Meningkatnya persentase populasi, peningkatan mutu ternak melalui Inseminasi buatan (IB) -Bunting -Lahir	100 ekor 81 ekor	154 82	37% 5%
b.		Terobati/terpeliharanya ternak/hewan dan teridentifikasi pangan asal hewan yang diperjualbelikan -Terobati/terpeliharanya ternak :... ekor -Teridentifikasi PAH :... sampel	-150.000 ekor -50 sampel	-220.217 ekor -110 sampel	

		c.Peningkatan pelayanan pasar ternak dan jumlah pengolahan produk ternak	100 %	97,36 %	97,36 %
		d.Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	5000 ekor	5.466 ekor (Sapi 1.800 dan babi 3.666 ekor)	109,32 %
3.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang perikanan	a.Peningkatan produksi benih ikan	3%	18,4%	613%
		b.Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi keluarga dan masyarakat	4%	-17,2%	82,7%
		c.Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan serta sosialisasi gemarikan	0,5 kg/kap/th	0,45 kg/kap/th	85%
		d.Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan perikanan	3 %	-6,9%	93,1
4.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan	a. Persentase pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan	16,4	13,1	79,9 %
		b.Peningkatan persentase ketersediaan pangan - Energi - Protein	3.030 94,13	3.180 79,89	105 % 84,9 %
		c.Penguatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	80	60	75 %
5.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan	a. Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi	88	85,5	97,2 %
		b. Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,5	89,7	98 %
		c.persentase peningkatan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan	87,8	79,9	91 %
2.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna				
6.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna	a. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani 16 %	43	40	93 %
		b. Meningkatnya jumlah kelembagaan Tani (Kelompok Tani, Gapoktan dan Pokdakan)	304	349	114,8 %
		c. Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Pohlusde dan Posluhkan) 12 %	39	43	110,3 %

Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Laporan Indikator Kinerja Utama dari setiap kegiatan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

3.2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Nilai Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai Capaian	
			2016	2017
1	2	3	5	6
1	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi bidang pertanian dan ketahanan pangan			
1.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura	a. Terwujudnya persentase nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura	98,11 %	87,5 %
		b. Tercukupinya jumlah bibit buah-buahan yang bersertifikasi	98,36 %	77,77 %
		c. Tersedianya jumlah pupuk dan pestisida di wilayah kota jambi	99,35 %	100 %
		d. Terwujudnya persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	85,83 %	94,11 %
2.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan	a. Meningkatkan persentase populasi, peningkatan mutu ternak melalui Inseminasi buatan (IB) -Bunting -Lahir	98,54 %	37% 5%
		b. Terobati/terpeliharanya ternak/hewan dan teridentifikasi pangan asal hewan yang diperjualbelikan -Terobati/terpeliharanya ternak :... ekor -Teridentifikasi PAH :... sampel	94,43 %	27 % 5 %
		c. Peningkatan pelayanan pasar ternak dan jumlah pengolahan produk ternak	96,15 %	97,36 %
		d. Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	96,92 %	109,32 %
3.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang perikanan	a. Peningkatan produksi benih ikan	93,65 %	613%
		b. Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi keluarga dan masyarakat	97,73 %	82,7%
		c. Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan serta sosialisasi gemarikan	89,04 %	85%
		d. Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan perikanan	98,92 %	93,1

4.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan	a. Persentase pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan	99,9 %	79,9 %
		b.Peningkatan persentase ketersediaan pangan - Energi - Protein	99,87 %	105 % 84,9 %
		c.Penguatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	90,77 %	75 %
5.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan	a. Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi	99,02 %	97,2 %
		b. Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	97,97 %	98 %
		c.persentase peningkatan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan	97,17 %	91 %
2.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna			
6.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna	d. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani 16,5 %	99,69 %	93 %
		e. Meningkatnya jumlah kelembagaan Tani (Kelompok Tani, Gapoktan dan Pokdakan)	95,28 %	114,8 %
		f. Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Pohlusde dan Posluhkan) 12 %	98,53 %	110,3 %

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain:

- a. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - Adanya kegiatan promosi produk-produk hasil kegiatan unggulan daerah baik didalam maupun diluar daerah;
 - Ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian;
 - Adanya upaya standarisasi produk-produk pengolahan pangan sesuai standard mutu, kesehatan, dan keamanan pangan;
- b. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - Adanya kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya bidang yang membidangi kesehatan hewan dengan Provinsi Jambi;

- Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang peternakan terhadap pelayanan gratis yang diberikan terhadap hewan ternak/peliharaan;
 - Adanya kegiatan promosi produk-produk hasil olahan daging baik didalam maupun diluar.
- c. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang perikanan;
- Peningkatan produksi benih disebabkan karena meningkatnya produksi benih di unit-unit perbenihan rakyat, terutama untuk benih ikan patin yang disebabkan karena tingginya permintaan benih patin dari luar kota jambi.
- d. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- Tidak tercapainya target realisasi dari jumlah ketersediaan pangan (beras) yang dikonsumsi per kapita per tahun pada tahun 2017 dikarenakan cadangan produksi pangan (beras) hanya berjumlah 60 ton;
 - Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan dan meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, melalui:
 - ü Pengembangan sistem cadangan pangan daerah
 - ü Pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan tidur)
 - ü Pengembangan sistem cadangan pangan melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

- Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kota Jambi tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi perencanaan kinerja organisasi adalah kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan pemerintah, dan Pengembangan Desa mandiri pangan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
- e. Indikator terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- Tercapainya target realisasi dari target nilai/skor Pola Pangan Harapan, disebabkan karena pembinaan dan sosialisasi pangan B2SA (beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan aman bagi tubuh. Perlunya pangan B2SA dikarenakan tidak ada satupun jenis pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu manusia membutuhkan lebih kurang 45 jenis zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air) dalam jumlah yang cukup dari berbagai jenis makanan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
 - Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kota Jambi tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, Peningkatan mutu dan keamanan pangan, dan penyuluhan sumber pangan alternatif. Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

f. Indikator pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna bidang prasarana sarana dan penyuluhan.

- Tercapainya target realisasi dikarenakan adanya partisipasi penyuluh dalam memberikan pembinaan dan adanya pola komunikasi dan koordinasi serta pembinaan yang dilakukan oleh setiap unsur masyarakat khususnya kelompok tani;
- Dalam rangka meminimalisir kegagalan pada tahun yang akan datang dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - c. Mengembangkan kompetensi tenaga penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan;
 - d. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan;
- Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan tersebut, kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah kegiatan Penyuluhan dan pendampingan kelompok petani, Peningkatan kemampuan lembaga petani dan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh petani. Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Secara umum pencapaian indikator sasaran strategis yang telah terlihat pada indikator kinerja tiap-tiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2017 telah sesuai dengan yang ditargetkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja diatas target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa IKU kegiatan yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan dimasa yang akan

datang capaian semua indikator sasaran yang berupa indikator kinerja dapat lebih optimal.

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai melalui Belanja langsung dan Belanja tidak langsung yang dituangkan dalam APBD 2017 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2016 dan 2017

No	Sasaran	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan
1	2	3			4	5	6
1	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi bidang pertanian dan ketahanan pangan						
1.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura	4.041.926.000	3.920.511.196	96,99 %	1.831.767.000	1.783.181.921	97,34 %
2.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan	1.597.767.500	1.550.821.830	97,06 %	975.997.000	956.102.100	97,96 %
3.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang perikanan	2.102.320.000	1.988.571.850	94,6 %	2.367.333.000	2.339.793.500	98,84 %
4.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan	551.403.000	525.065.000	95,22 %	661.190.000	641.302.000	96,99 %
5.	Terwujudnya pertambahan	689.784.500	681.582.000	98,81 %	745.000.000	717.047.400	96,25 %

	produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan						
2.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna						
6.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna	480.807.550	479.625.050	99,75 %	1.098.015.000	914.138.387	83,25

Realisasi penyerapan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 rata-rata mencapai > 90 %. Walaupun penyerapan anggaran dibawah 100 % tetapi target indikator sasaran dapat tercapai sesuai target fisik yaitu 100%. Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk setiap kegiatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Tingkat capaian kinerja SKPD (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk yang aman dikonsumsi bidang pertanian dan ketahanan pangan				
1.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang tanaman pangan dan hortikultura	a. Terwujudnya persentase nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura	135.936.000	135.481.000	99,67
		b. Tercukupinya jumlah bibit buah-buahan yang bersertiikasi	450.000.000	439.872.671	97,75
		c. Tersedianya jumlah pupuk dan pestisida di wilayah kota jambi	250.058.800	232.994.050	93,18
		d. Terwujudnya persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	995.772.200	974.834.200	97,90
2.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan	a. Meningkatnya persentase populasi, peningkatan mutu ternak melalui Inseminasi buatan (IB)	328.606.000	319.306.000	97,17
		b. Terobati/terpeliharanya	158.785.000	157.053.100	98,91

	produk aman dikonsumsi bidang peternakan dan kesehatan hewan	ternak/hewan dan teridentifikasi pangan asal hewan yang diperjualbelikan			
		c.Peningkatan pelayanan pasar ternak dan jumlah pengolahan produk ternak	307.103.000	299.003.000	97,36
		d.Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	181.503.000	180.740.000	99,58
3.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang perikanan	a.Peningkatan produksi benih ikan	279.500.000	274.914.550	98,36
		b.Tersedianya kebutuhan protein hewani guna memenuhi gizi keluarga dan masyarakat	210.000.000	204.732.600	97,49
		c.Terlaksananya diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan serta sosialisasi gemarikan	202.000.000	196.329.250	97,19
		d.Terlaksananya intensifikasi budidaya/ perbenihan perikanan	1.675.833.000	1.663.817.100	99,28
4.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang ketersediaan dan distribusi pangan	a. Persentase pemantapan stabilitas harga dan pasokan pangan	105.000.000	104.200.000	99,24
		b.Peningkatan persentase ketersediaan pangan - Energi - Protein	256.190.000	246.005.000	96,02
		c.Penguatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	300.000.000	291.097.000	97,03
5.	Terwujudnya pertambahan produksi dan ketersediaan produk aman dikonsumsi bidang konsumsi dan keamanan pangan	a. Persentase jumlah pangan segar hasil pertanian aman konsumsi	150.000.000	148.762.500	99,18
		b. Peningkatan persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	235.000.000	216.722.000	92,22
		c.persentase peningkatan kecukupan pangan rumah tangga rawan pangan	210.000.000	209.228.400	99,63
2.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna				
6.	Terwujudnya pengembangan fungsi usaha kelompok produksi dan pengolahan hasil yang menggunakan teknologi tepat guna	g. Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani	300.000.000	199.792.000	66,60
		h. Meningkatnya jumlah kelembagaan Tani (Kelompok Tani, Gapoktan dan Pokdakan)	150.000.000	121.55.000	81,04
		i. Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan (BP3K, Pohlusde dan Posluhkan) 12 %	325.000.000	318.772.000	98,08

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada kegiatan kemampuan lembaga petani dengan indikator kinerja Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani dengan serapan anggaran hanya sebesar 66,6 % yang disebabkan adanya silfa atau sisa anggaran belanja akomodasi/transport acara PENAS Aceh. Sedangkan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna menyerap anggaran sebesar 84,83% yang disebabkan adanya sewa buldoser tidak dibelanjakan karena sudah ada escavator, belana sewa ini uga berpengaruh terhadap belanja jasa kerja/operator alat beerat dan belanja bahan bakar alat berat. selanjutnya sisa anggaran yang tidak terserap pada kegiatan lainnya tersebut merupakan hasil efisiensi dari penggunaan anggaran terutama dari sisa hasil lelang. Selain itu penggunaan anggaran dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang sudah ditentukan.

3.2.4 Prestasi Tahun 2017

Hasil kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi pada Tahun 2017 yang diikutsertakan dalam perlombaan tertentu ada yang berprestasi pada tingkat Provinsi dan Nasional, diantaranya adalah:

1) Tingkat Nasional

- Terdaftarnya komoditi unggulan Kota Jambi yaitu komoditi Al-Pukat varietas “Betuah” pada pusat perlindungan Varietas tanaman dan Perizinan Pertanian yang bernama “Al-Pukat Betuah”.
- Diterimanya sertifikat pertanian organik untuk kelompok tani “Kampoeng Organik” Paal Merah ruang lingkup sayuran “inofice” (Indonesian Organic Farming Certification).

2) Tingkat Provinsi

- Juara 2 lomba THL Teladan an. Putri Indah hayati;
- Juara 3 Lomba Gapoktan Teladan pada Hari Krida (HKP) Pertanian di Kerinci atas nama kelompok Gapoktan Subur Makmur (Ketua: Sunaryo (Petani);
- Juara 3 Lomba cerdas cermat KTNA pada Hari Krida Pertanian (HKP) di Kerinci.
- Juara 2 Lomba Inovasi masakan hasil laut an.Akma

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. LKj berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan ruang pembuktian Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam toak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh setiap instansi pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Dari penjelasan bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

- a. Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih rendah, khususnya kinerja dan kedisiplinan aparatur masih rendah.
- b. Kurangnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang tersedia tepat waktu saat musim tanam tiba.
- c. Kurangnya ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian.
- d. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir.
- e. Kondisi cuaca dan iklim yang kurang mendukung.
- f. Harga jual hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan tidak kompetitif

- g. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha
- h. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan laju peningkatan produksi
- i. Terbatasnya lahan dan menurunnya produktifitas lahan yang disebabkan tingginya alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukkan lainnya (industri, pergudangan, pertokoan, dll)
- j. Status kepemilikan lahan usahatani yang bukan milik sendiri dan luas lahan usahatani yang relatif kecil
- k. Produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan masih kurang berdaya saing di pasaran.

B. Langkah-langkah Penanganan yang diperlukan untuk pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dimasa yang akan datang antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber produksi pertanian, peternakan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik internal maupun eksternal;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi;
4. Memantapkan ketersediaan pangan dalam menuju kemandirian pangan, stabilitas harga pokok pangan dan peningkatan kualitas konsumsi keamanan pangan;
5. Mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu seperti beras;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk;
7. Mengupayakan sinergi dan sistem terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksana program pembangunan ketahanan pangan;
8. Mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) sebagai langkah untuk melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya kasus rawan pangan dan gizi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2017 dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan dan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di masa datang.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Jambi

Ir. H. A. DAMIRI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19610416 199303 1 003

